

BAB I

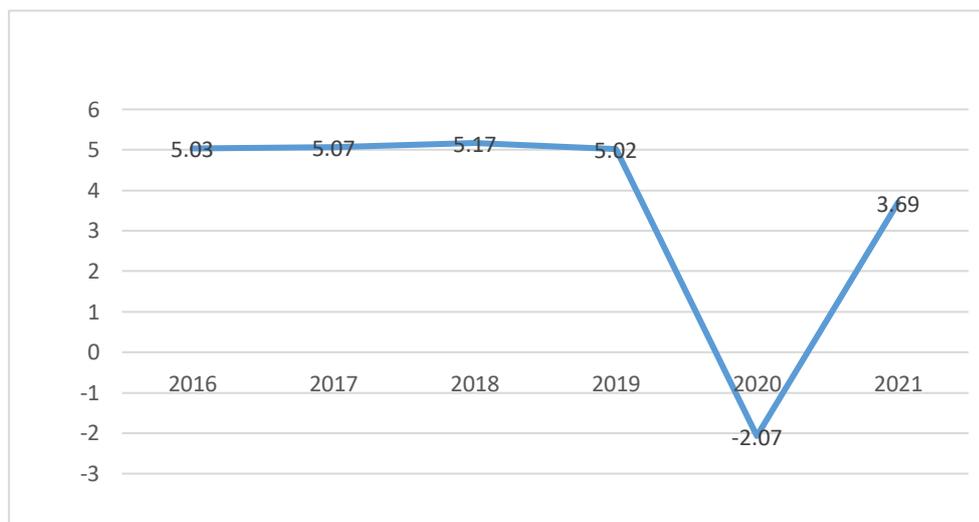
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output total dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari jumlah pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh perubahan struktur perekonomian atau tidak (Afandi, 2014). Sudah sekian lama, perhatian utama masyarakat perekonomian dunia tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Para ekonomi dan politisi dari semua negara, baik negara-negara kaya maupun negara miskin, yang menganut sistem kapitalis, sosial maupun campuran, semuanya sangat mendambakan dan menomorsatukan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Masalah pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Yasa & Sudarsana, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memperbaiki indeks pembangunan manusia, karena pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Dewi & Sutrisna, 2014). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu keberhasilan pembangunan. Dengan demikian semakin tingginya pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2011:423).

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian dalam hal barang dan jasa yang diproduksi dengan tujuan menambah kemakmuran masyarakat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2016-2021 tersaji dalam sebuah Gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2021 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

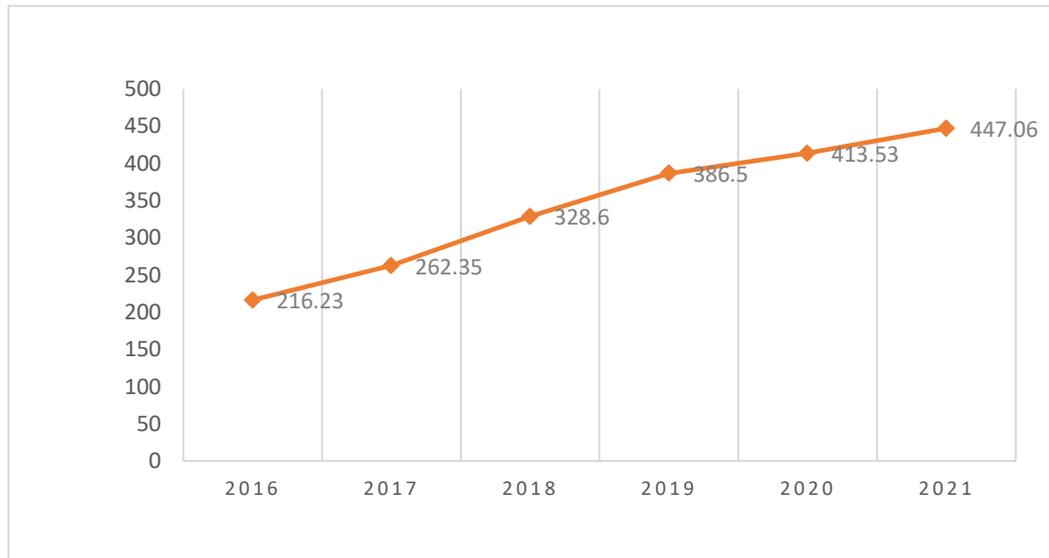
Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari 5,03 persen pada tahun 2017 menjadi 5,17 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2018,

laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,02 persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi -2,07 persen. Hal ini disebabkan karena dunia digemparkan oleh *coronavirus disease* (COVID-19). Hal ini tentu menyebabkan pemerintah melakukan beberapa kebijakan karena fokusnya terbagi antara ekonomi dan kesehatan. Selanjutnya di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali tumbuh sebesar 3,69 persen, hal ini dikarenakan dalam bidang kesehatan, penguatan strategi pengendalian pandemi COVID-19 terus dilakukan. Akselerasi vaksinasi melalui pemberian dosis vaksin ketiga (booster) terus ditingkatkan, sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Untuk melihat penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Kedua variabel tersebut merupakan dua instrumen investasi yang saling berkaitan. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh penanam modal domestik baik perorangan maupun badan usaha, penanaman modal asing dilakukan oleh penanam modal asing baik menggunakan modal asing maupun modal dalam negeri, karena dengan penanaman modal maka akan sangat memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat diharapkan menstabilkan dan berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Shem & Ferry, (2023) penanaman modal di Indonesia adalah salah satu fokus penting pemerintah. Kebijakan-kebijakan juga banyak difokuskan untuk mengembangkan penanaman modal secara masif di Indonesia, hal ini menginduk pada sasaran pembangunan yang terdapat pada rencana strategis Indonesia bahwa pemerintah telah merencanakan perencanaan peningkatan realisasi penanaman modal, meningkatkan kepercayaan para pelaku ekonomi dan penanam modal, serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Astuti (2017) mengemukakan bahwa faktor yang menentukan arus modal ekonomi, kondisi sosial serta transparansi keuangan.

Secara sederhana penanaman modal dalam negeri dapat diartikan sebagai langkah awal untuk melakukan pembangunan ekonomi suatu negara. Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2007 adalah “kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri”. Menurut penjelasan tersebut dapat diartikan juga bahwa penanaman modal dalam negeri dapat secara langsung mempengaruhi kondisi suatu perekonomian dalam suatu negara, khususnya dalam hal pendapatan modal. Berikut merupakan realisasi PMDN Indonesia dari tahun 2016 sampai 2021.



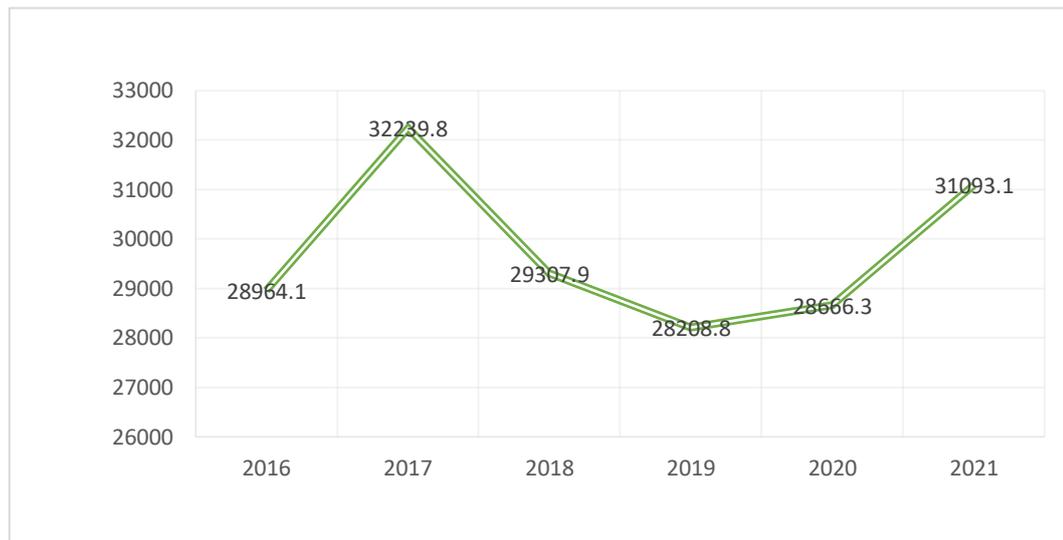
Gambar 1.2 PMDN Indonesia Tahun 2016-2021 (Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat kita ketahui bahwasanya nilai penanaman modal dalam negeri Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diawali dari tahun 2016 yaitu sebesar 216,23 triliun rupiah hingga tahun 2021 yang bernilai 447,06 triliun rupiah. Hal ini terjadi salah satunya karena adanya kebijakan tentang penanaman modal dalam negeri yaitu berupa dukungan investasi, seperti kemudahan dalam perizinan fiskal (Nehemia, 2023).

Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi asing yaitu kegiatan arus modal yang didapatkan dari pihak luar yang bergerak ke bidang dari Investasi Asing. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengartikan penanaman modal asing seperti investasi yang dijalankan oleh perusahaan di dalam negara terhadap perusahaan di negara lain demi keperluan mengelola operasi perusahaan di negara tersebut (Fadilah, 2017). Penanaman

Modal Asing (PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan (Nurana, 2011).



Gambar 1.3 Realisasi PMA Indonesia Tahun 2016-2021 (Juta USD)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.

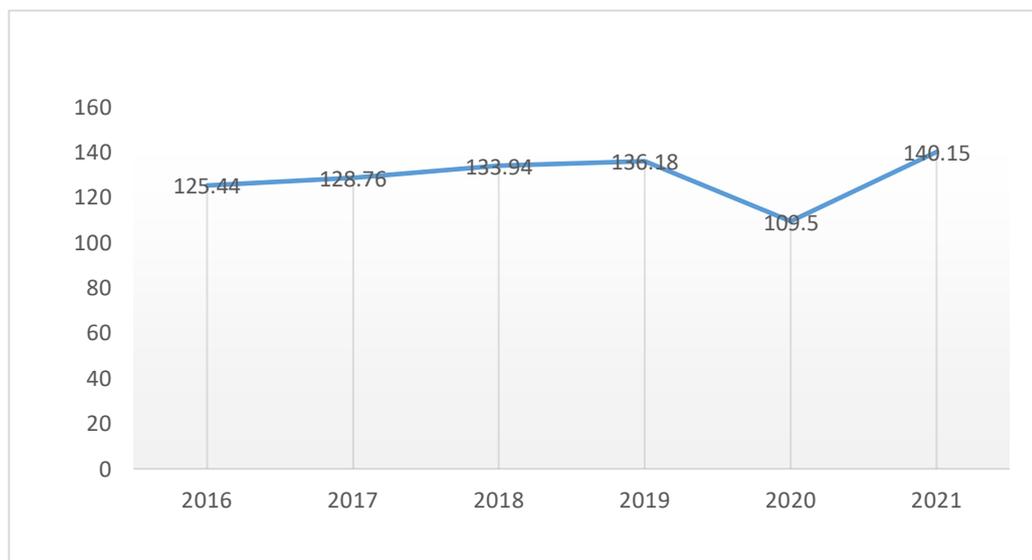
Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa penanaman modal asing Indonesia mengalami fluktuasi. Berawal dari tahun 2016 yang semula bernilai 28964,1 juta USD, kemudian naik pada tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 32239,8 juta USD. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi 29307,9 juta USD, pada tahun 2019 juga kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 28208,8 juta USD, kemudian pada tahun 2020 kembali naik menjadi sebesar 28666,3 juta USD. Terakhir pada tahun 2021 berhasil naik kembali menjadi sebesar 31093,1 juta USD.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Menurut Melni Yunita, (2019) perubahan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Semakin banyak

tenaga kerja akan mempercepat hasil produksi sehingga output yang dihasilkan juga semakin meningkat. Selain menambah pendapatan negara tentu saja dengan adanya tenaga kerja ini juga dapat mengurangi satu masalah yaitu masalah pengangguran. Faktor produksi tenaga kerja dalam hal ini adalah tenaga kerja, yang merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. (Sumarsono, 2003) menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah; atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksana pembangunan itu sendiri yaitu para pekerja khususnya dan seluruh penduduk Indonesia pada umumnya. Indonesia sebagai negara berpendudukan terbesar ke 5 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 241 juta lebih pada tahun 2011, berarti Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang besar (Putra, 2012). Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi selain faktor produksi lahan, modal dan manajemen/skill. Mengingat pentingnya faktor tersebut, potensi tenaga kerja hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik (Arida, 2015).

Penurunan pertumbuhan tenaga kerja ini kemungkinan disebabkan oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih kurang dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Menurut teori, faktor produksi berhubungan positif dengan jumlah output, dimana kenaikan faktor produksi akan meningkatkan kapasitas produksi yang berarti kenaikan pada output yang dihasilkan, artinya terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi (Yunita, 2019).



Gambar 1.4 Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016 – 2021 (Juta Orang)
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, diolah.

Berdasarkan Gambar 1.4 tersebut dapat diketahui fluktuasi tenaga kerja Indonesia dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja Indonesia berada pada jumlah 125,44 juta orang. Kemudian pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja Indonesia mengalami kenaikan menjadi berjumlah 128,76 juta orang. Pada tahun tahun selanjutnya juga terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 yang berjumlah 136,18 juta orang. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi

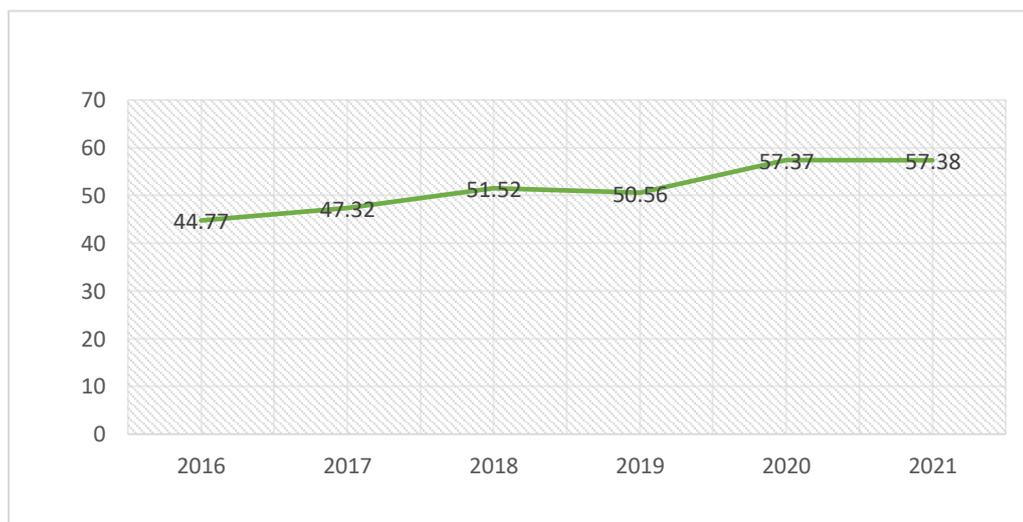
penurunan yang cukup drastis menjadi berjumlah 109,5 juta orang. Hal ini terjadi karena Negara Indonesia dilanda wabah *Covid-19*. Kemudian pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja Indonesia berhasil naik kembali menjadi berjumlah 140,15 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diketahui dari belanja negara. Belanja negara merupakan salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya perekonomian negara, maka pengaruh belanja negara terhadap perekonomian juga mengalami transformasi. Tuntutan terhadap efektivitas kinerja pemerintah yang tercermin dalam efisiensi birokrasi dan kapabilitas pemerintah dalam menciptakan inovasi kebijakan semakin tinggi (Wahab, 2004). Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, peran belanja negara perlu sekiranya dijalankan berdasarkan tiga fungsi fiskal utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Sailesh, K. Jha, 1999).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menjelaskan tiga fungsi utama anggaran negara, yakni fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi (Direktorat

Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2014). Ketiga fungsi ini digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam menyusun desain belanja negara. Apabila belanja negara sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi, tetapi tidak dilandasi oleh ketiga fungsi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak memiliki kualitas yang baik. Hal ini akan memperlebar kesenjangan ekonomi dan berdampak negatif terhadap sisi sosial masyarakat.

Menurut (Yudi, 2022) belanja negara merupakan instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara, mewujudkan pembangunan, pemerataan, serta kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintah dalam melaksanakan belanja negara sebagai amanat rakyat, tentunya harus dikelola dengan tata kelola yang baik (*good governance*) agar keluaran/output yang dihasilkan atas program-program yang dituangkan dalam APBN tersebut dapat secara nyata dan optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



Gambar 1.5 Belanja Negara Indonesia Tahun 2016 – 2021 (Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah.

Berdasarkan Gambar 1.5 diatas merupakan realisasi belanja negara Indonesia selama enam tahun terakhir yang mengalami perubahan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 total realisasi belanja negara Indonesia sebesar 44,77 triliun rupiah. Di tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi sebesar 44,77 triliun rupiah. Pada tahun 2018 belanja negara Indonesia berada pada nilai 51,52 triliun rupiah, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 50,56 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021 belanja negara Indonesia kembali naik menjadi sebesar 57,37 triliun rupiah. Perubahan perubahan tersebut tentunya berdampak pada perekonomian Indonesia itu sendiri, dalam hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dari peningkatan dan penurunan tersebut tentunya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam hal dana perimbangan dan dana insentif daerah.

Dari fenomena dan permasalahan diatas serta didasarkan pada keterkaitan antara fenomena nya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh PMDN, PMA, Tenaga Kerja, dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana PMDN, PMA, tenaga kerja dan belanja negara di Indonesia tahun 2000-2021?

2. Bagaimana pengaruh PMDN, PMA, tenaga kerja, dan belanja negara secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000-2021?
3. Bagaimana pengaruh PMDN, PMA, tenaga kerja, dan belanja negara secara bersama sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana PMDN, PMA, tenaga kerja, dan belanja negara di Indonesia tahun 2000-2021.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh PMDN, PMA, tenaga kerja, dan belanja negara secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000-2021.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh PMDN, PMA, tenaga kerja, dan belanja negara secara bersama sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan mengambil data dari *website* resmi Badan Pusat Statistik dan Kementrian Ketenagakerjaan. *Website* tersebut menyajikan data-data yang valid mengenai perekonomian Indonesia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

| No | Keterangan | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | |
|----|------------------------------|------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|--|--|--|--|
| | | Sep | | | | Okt | | | | Nov | | | | Des | | | | Jan | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Usulan Penelitian | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Seminar Usulan Penelitian | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisi Usulan Penelitian | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Analisis Data | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 7 | Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 8 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |